



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.934>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 1001-1010

Research Article

Politik Identitas Dalam Pandangan Islam

Elly Warnisyah Harahap¹, Nurajidah Dalimunthe², Annisa Pratiwi Suriyanto³

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; ellywarnisyah@uinsu.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nurajidahdalimuntheo7@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; annisapratiwio512@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 25, 2024

How To Cite: Elly Warnisyah Harahap, Nurajidah Dalimunthe and Annisa Pratiwi Suriyanto (2024) "Identity Politics in Islamic Views", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 1001-1010. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.934.

Identity Politics in Islamic Views

Abstract. This article seeks to lift back years of efforts by religious entities to remedy conflict and help build peace. Because in today's people's lives, conflicts are much more interesting to discuss and the efforts of religious leaders to end conflicts and build peace are not too massively discussed. Identity as a political tool in Islamic teachings is permissible, but with conditions including: Not harming each other, not putting each other down or making fun of each other, not using violence (racism), distinguishing one group from another, tribe or race (ethnic fanaticism).

Keywords: Politics, Identity, Islam

Abstrak. Artikel ini berupaya mengangkat kembali usaha selama bertahun-tahun entitas agama untuk memperbaiki konflik dan membantu membangun perdamaian. Sebab dalam kehidupan masyarakat kini, konflik jauh lebih menarik di diskusikan serta upaya para pemimpin agama untuk

mengakhiri konflik dan membangun perdamaian tidak terlalu masif dibahas. Identitas sebagai alat politik dalam ajaran agama Islam dibolehkan, namun dengan syarat-syarat di antaranya adalah: Tidak merugikan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak menggunakan dengan cara kekerasan (rasialisme), membedakan golongan satu dengan yang lainnya, suku maupun ras (fanatisme etnis).

Kata Kunci: Politik, Identitas, Islam

PENDAHULUAN

L.A. Kauffman yang pertama kali menjelaskan hakikat politik identitas dengan melacak asal-muasalnya pada gerakan mahasiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an (Kauffman, 2001). Siapa sebenarnya yang menciptakan istilah politik identitas itu pertama kali masih kabursampai hari ini. Tetapi secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di sinilah idetentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan. Di Amerika Serikat, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasaanlah yang membangun kesadaran golongan yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu.

Bentuk ekstrem politik identitas adalah mencuatnya sampai batas-batas tertentu gagasan tentang separatisme. Ini terlihat misalnya di Quebec, yang berbahasa dan berbudaya Perancis, yang ingin memisahkan diri dari bangsa Kanada yang berbahasa Inggris. Begitu juga terbaca dalam gerakan Islam tipikal Louis Farrakhan (l. 1933) dengan *The Nation of Islam*-nya di Amerika Serikat, tetapi yang ditolak oleh kelompok hitam Muslim arus besar lainnya. Tetapi pada tahun 2000 politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian antara Farrakhan dengan Wareeth Din Muhammad, mantan saingannya, untuk meredam politik identitas kelompok Muslim Hitam untuk kemudian menyatukan dirinya dengan arus besar bangsa Amerika yang plural.

Dalam pandangan Gutmann, politik identitas, yang juga terlihat pada gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika, sesungguhnya lebih didorong oleh argumen keadilan sosial, bu kan karena alasan agamanya (Gutmann, 2003). Dalam perspektif ini, gerakan Muslim Hitam di Amerika tidak banyak berbeda dengan gerakan etno-religius lainnya. Sekali lagi, karena mengalami perlakuan yang tidak adil dan ingin berlakunya prinsip persamaan (*equality*) dalam masyarakat luas, gagasan tentang politik identitas telah menjadi topik kajian di kalangan para ilmuwan dengan membingkainya dalam teori-teori sosial yang beragam. Sikap pro dan kontra di kalangan ilmuwan telah semakin merangsang orang untuk mengenal lebih jauh apa hakikat politik identitas.

Menurut Hans Kung yang dikutip, kelompok yang paling fanatik, termasuk perjuangan politik radikal salah satunya diilhami oleh ajaran agama.³ Hal ini terlihat

dari adanya kelompok beragama yang masih percaya iman yang menjadi inspirasi, dan ide-ide yang mendasari pandangannya tentang dunia, tetapi juga di dorong oleh keyakinan untuk terlibat dalam kekerasan dan konflik yang dilandasi “perang melawan kejahatan” tadi. Dalam beberapa tahun terakhir, literatur-literatur tentang kontribusi agama untuk konflik dan kekerasan banyak dijumpai (misalnya, Serangan Teroris di berbagai negara). Berbagai kelompok bersenjata, seperti al-Qaeda, ISIS, yang mengklaim pembenaran agama atas aktivitas serangan-serangan mereka. Kelompok-kelompok Islamis ekstremis tersebut secara kolektif dicirikan oleh ideologi jihad yang serupa.

Namun, agama juga menawarkan pemeliharaan atas nama kedamaian yang berwujud toleransi. Oleh karena itu, secara sosiologis agama memiliki peran pemersatu (integratif) terhadap umat beragama yang sama. Namun, fungsi ini bisa luntur apabila bertemu dengan umat beragama di luar keyakinan mereka. Hendropuspito yang dikutip Affandi, menyebut agama sebagai titik sentral persatuan dan pemupuk persaudaraan (Haynes, 2020). Namun, realitasnya agama juga memiliki fungsi dis-integratif yang ditentukan oleh hubungan antar umat beragama secara internal dan eksternal (Affandi, 2012).

Secara tekstual dan kontekstual, semua agama-agama faktanya mengajarkan nilai-nilai persatuan dan perdamaian. Bahkan mengancam kekerasan dan konflik. Wajah ini bisa dilihat dari mereka-mereka yang dipegang oleh mayoritas terbesar umat beragama. Yakni orang-orang yang cinta damai yang ingin betul-betul mengabdikan diri kepada Tuhan untuk kemaslahtan masyarakat, dan bangsa. Sehingga, secara mendasar agama mengajarkan kebaikan bagi setiap umatnya. Dengan demikian, tidak tepat atau perlu untuk menilai kembali peran agama dalam konflik dan bahwa agama selalu memperburuk konflik. Sebaliknya, artikel ini berupaya mengangkat kembali usaha selama bertahun-tahun entitas agama untuk memperbaiki konflik dan membantu membangun perdamaian. Sebab dalam kehidupan masyarakat kini, konflik jauh lebih menarik di diskusikan serta upaya para pemimpin agama untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian tidak terlalu masif dibahas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi politik identitas dalam pandangan Islam dapat mencakup studi literatur, analisis konten, dan penelitian lapangan. Tahap awal penelitian akan fokus pada pengumpulan bahan pustaka terkait politik identitas dan pandangan Islam dari berbagai sumber akademis dan literatur Islam. Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi pola pemikiran, konsep, dan pandangan dalam teks-teks kunci yang relevan.

Selanjutnya, penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara dengan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang politik identitas dalam konteks Islam. Responden yang mungkin terlibat melibatkan cendekiawan Islam, aktivis, atau anggota komunitas Muslim yang terlibat dalam politik. Wawancara ini akan memberikan wawasan langsung tentang pandangan dan pengalaman individu terkait politik identitas Islam. Penggunaan metode kualitatif seperti studi kasus atau fenomenologi dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep politik

identitas dalam pandangan Islam. Observasi partisipatif juga dapat menjadi metode tambahan untuk memahami dinamika politik identitas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Dengan kombinasi metode literatur, analisis konten, penelitian lapangan, dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan dan menganalisis kompleksitas politik identitas dalam konteks pemikiran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas

Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Syarif, 2002).

Menurut Jeffrey Week, identitas berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain (Widayanti, 2009). Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Adapun identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005).

Oleh karenanya identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*politica of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacupada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber daya dan sarana politik (Chakim, 2022).

Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka (Widayanti, 2009). Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari ‘*sense*’ (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas”. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (perbedaan) atau sesuatu yang di luar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda

(*categories of difference*) (Setyaningrum, 2005).

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu (Widayanti, 2009):

1. Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan- ikatan kultural dalam masyarakat.
3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan

Menurut Cressida Heyes, mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politik dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman- pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu

Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Syarif, 2002). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarginalkan dari kelompok mayoritas ataupun sebaliknya untuk memperkuat suara dari mayoritas.

Di era politik kontemporer saat ini, politik identitas dapat menjadi ancaman bagi sikap nasionalisme bangsa dan keutuhan negara dalam realitas keagamaan yang terus terkait politik identitas, oleh karena itu, bila diarahkan dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik berhubungan langsung pada kondisi negara kesatuan republik Indonesia

yang multi-kulturalistik.

Kendatipun demikian, relasi antara agama dan politik sudah terjalin dan berkelindan cukup lama di Indonesia. Politisasi agama sebagai identitas yang mempunyai kekuatan penarik massa sudah menjadi fenomena dan fakta yang sebetulnya sudah terjadi dari sebelum kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi lumrah di masyarakat. Sejak awal abad ke-20 berbagai kelompok masyarakat yang terjalin dari kesesuaian sosial-politik-agama mulai bermunculan di Indonesia. Akan tetapi persoalannya adalah pemahaman masyarakat terhadap politik masih dapat dikatakan minim yang pada akhirnya agama sering dikendarai sebagai senjata politik ampuh untuk menyongsong kepentingankelompok tertentu.

Pandangan Islam terhadap Politik Identitas

Dalam Alquran (dan Hadis) terdapat sejumlah kata yang berarti masyarakat atau komunitas, seperti kata *ummat (umam)*, *sy'a'b (syu'ûb)*, *qabilah (qabdil)*, dsb. Namun di dalam Alquran tidak ditemukan istilah negara. Hal ini dapat dimaklumi karena konsep negara atau negara-bangsa seperti yang terjadi sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469- 1527). Pada masa klasik dan pertengahan tidak pernah ada di antara para ulama. Mengenai agama dan negara menyatu atau terpisah, karena dalam ikatan, para khalifah adalah pemimpin negara dan juga agama (*hirasah al-din wa siyasa al-dunya*) Namun pada masa kini hal ini kadang-kadang masih diperdebatkan di kalangan intelektual Muslim. Jika istilah "masyarakat Islam" sudah sepakat tentang ketentuannya, maka istilah "negara Islam" masih diperdebatkan, bahkan konsep atau ide-ide tentang "negara Islam" pun kadang-kadang masih dipersoalkan oleh kalangan tertentu (Rasyid, 1976). Islam adalah agama yang memiliki sistem berpolitik yang khas. Umat Islam harus kembali kepada ketatanegaraan Islam itu, yakni sistem dari Rasulullah dan Khulafa'ur Rasidin (Rahman, 2012).

Pada umumnya, istilah umum negara Islam itu tidak diperebutkan dalam Alquran dan Hadis, tetapi konsep negara itu dalam Islam, karena secara substansial termasuk ayat Alquran dan Hadis yang menunjukkan keterwakilan pemerintahan pada umat Islam. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai Nabi tetapi juga pemimpin umat yang dapat disebut sebagai negara. Di samping itu, terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan masyarakat dan negara, meskipun tidak ada satu pun ayat yang menunjukkan tentang pengaturan negara. Hal ini kemudian diselesaikan, negaraatau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum-hukum itu, sehingga membentuk negara termasuk dalam kaedah: *mà là yatimm alwajib illa bih fahuwa wäjib* (apa saja yang bisa dilakukan oleh agama itu dapat dilakukan dengan bantuannya, maka demikian juga menjadi wajib). Dari segi istilah, "negara Islam" (daulah Islamiyyah) itu sendiri baru muncul pada pertengahan abad ke-20 yang lalu, yang diterjemahkan sebagai negara yang melakukan etika dan syariah Islam. Istilah *dawlah* ini bendungan dari istilah yang telah digunakan pada masa kekhalifahan Dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah (dawlah Umawiyah dan dawlah 'Abbasiyyah), yang pada waktu itu diartikan sebagai "pembaruan din dinasti" (Shaltut, 1966).

Oleh karenanya Islam sudah sejak lama menganjurkan menggunakan

identitas keislaman dalam kehidupan politik dan bermasyarakat. Kendati kata politik identitas tidak sepenuhnya diterjemahkan secara eksplisit di dalam ajaran agama Islam terkhususnya di dalam Alquran, namun dapat ditemukan dalam Alquran yang terdapat beberapa istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas dalam perpolitikan. Kendati dalam hal ini tidak sesuai dan tidak sistematis saat ditampilkan yang dikenal pada era modern ini, tetapi melalui kajian yang melingkupi di mana Alquran memberikan isyarat mengenai politik identitas dalam dunia perpolitikan. Rangkaian istilah ini juga terkait dengan pengarah besar-besaran Alquran terhadap kebijakan politik beridentitas, di antaranya mengenai pemimpin itu harus laki-laki atau perempuan, pemimpin itu harus muslim atau non muslim, pemimpin harus darisuku atau rasnya masing-masing, dan lain sebagainya.

Melihat fenomena yang terjadi di negara Indonesia ini pasti perlu adanya pembahasan mengenai politik identitas, karena segala cara untuk memenuhi tujuan identitas menjadi alat untuk mencapai tujuan. Misalnya agama, agama dipakai sebagai senjata, suku, etnis, dan ras juga dipakai sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan, tanpa adanya pertimbangan kiri kanan yang sekiranya mengganggu, tetapi apa pun cara demi untuk mencapai tujuan semuanya ditempuh (Kurniawan, 2018).

Dengan merendahkan agama, ras, suku satu dengan meninggikan agama, ras, suku yang lain menjadi cara untuk mencapai tujuan. Dengan harus mewujudkan negara “*Rahmatan Lil Alamin*” perlu adanya tindakan Islam ataupun pemerintah dalam menegakkan tolak rasisme, fanatisme etnis, dan diskriminasi yang berbasis kotor. Inilah dasar-dasar yang harus diperjuangkan dan harus ditegakkan tanpa harus melihat pilihan-pilihan politik praktis yang sedang terjadi di negara Indonesia ini. Jangan memakai cara untuk menjatuhkan lawan satu dengan yang lainnya demi untuk mencapai tujuan dengan cara adu domba ataupun menjelekkan satu sama yang lain. Karena dengan cara seperti ini akan berbahaya bagi keutuhan dan kesatuan bangsa, dan pastinya juga akan merusak nama baik nilai-nilai luhur ajaran Islam di negeri ini (Muhtar, 2012).

Dalam hal ini pastinya Alquran akan ikut andil dalam meluruskan masalah-masalah yang terjadi dalam politik identitas ini. Disebutkan secara eksplisit keragaman etnis manusia dalam Alquran, Alquran juga menyebutkan perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku yang menunjukkan pengakuan terbuka Islam terhadap keragaman etnis dan budaya manusia. Allah Swt. telah menegaskan kemuliaan dan keutamaan manusia secara umum, tidak pandang etnis, bahasa, budaya, dan agamanya.

❁ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “70. Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra'/17:70)

Allah Swt. menyebutkan tentang penghormatan-Nya kepada Bani Adam dan kemuliaan yang diberikan-Nya kepada mereka, bahwa Allah telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dengan bentuk atau rupa yang baik, tinggi yang sedang, dapat menguasai segala hal yang ada di bumi untuk kesenangannya, mempunyai kemampuan untuk berindustri, berilmu, berbicara, makan dengan tangan dari makanan yang enak-enak yang berasal dari hewan, seperti daging, samin, dan air susu, ataupun yang berasal dari tumbuhan, seperti buah-buahan dan biji-bijian (Kasir, 2006).

Al-Qur'an juga mengisyaratkan tentang adanya keragaman etnis, bangsa, bahasa, dan budaya yang mana semua itu merupakan ketetapan Allah yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an yang sudah tidak bisa ditolak dan untuk tujuan-tujuan tertentu.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ اللَّائِيَاتِ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “22. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.” (Ar-Rum/30:22).

Ayat ini menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang lain, yaitu penciptaan langit dan bumi sebagai peristiwa yang luar biasa besarnya, sangat teliti, dan cermat. Sesungguhnya galaksi-galaksi itu banyak jumlahnya di angkasa luas, dan masing-masing galaksi itu merupakan sistem peredaran yang paling teratur, mereka tidak pernah berantakan akibat bertabrakan antara yang satu dengan yang lain, atau antara planet-planet yang ada pada masing-masing galaksi itu. Semuanya itu berjalan menurut aturan yang telah ditentukan.

Setelah menyebutkan kebesaran Allah melalui penciptaan langit dan bumi, ayat di atas menyatakan adanya keanekaragaman bahasa dan warna kulit. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia secara haq menjadikan manusia terdiri atas banyak ras yang kedudukannya sama di mata-Nya. Berbicara mengenai ras, Allah menjelaskannya melalui lidah atau lisan (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015).

Semua penduduk bumi sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, masing-masing mempunyai sepasang mata, sepasang alis, hidung, kelopak mata, mulut, pipi, dan seseorang dari mereka tidak serupa dengan yang lain. Tetapi masing-masing pasti mempunyai sesuatu ciri yang membedakan yang seorang dari yang lainnya, baik itu dalam hal rupa, bentuk, ataupun bahasa.

Perbedaan itu ada yang jelas dan ada yang samar, yang hanya diketahui setelah dilihat dengan teliti. Setiap wajah mereka mempunyai ciri khas dan rupa yang berbeda dengan yang lain. Tiada golongan orang pun yang mempunyai ciri khas yang sama dalam hal ketampanan rupa atau keburukannya, melainkan pasti ada perbedaan di antara masing-masing orang (Kasir, 2006).

Untuk saling mengenal keanekaragaman itu agar saling kenal satu sama lain. Yang berbeda atau yang sering dianggap asing dan aneh, dalam Alquran juga di jelaskan biar untuk saling mengenal bukan ditolak, apalagi dibenci.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Al-Hujurat/49:13).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Kebiasaan manusia selalu memandang harkat martabat itu selalu ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada-Nya.

Allah Swt. menceritakan kepada manusia bahwa Ia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Ia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah *syā'ibun* yang artinya lebih besar daripada kabilah, sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti fasail.

Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, Allah Swt. berfirman mengingatkan mereka, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama. Agar mereka saling mengenal di antara sesamanya, masing-masing dinisbahkan kepada suku atau bangsanya.

Dengan demikian menjadikan Identitas sebagai alat politik dalam ajaran agama Islam dibolehkan, namun dengan syarat-syarat di antaranya adalah: Tidak merugikan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak menggunakan dengan cara kekerasan (rasialisme), membedakan golongan satu dengan yang lainnya, suku maupun ras (fanatisme etnis).

KESIMPULAN

Kita tentu saja mengagumi beberapa negara di dunia yang bukan negara Islam, tetapi sistem yang diberlakukan menjadikan warga negara tenteram, aman, dan damai. Mereka saling menghargai, saling menghormati, memahami perasaan pihak yang berlainan agama. Jadi negara ini menjadi negara yang aman dan damai, penduduknya rukun walau berlainan kepercayaan, hidup mereka sejahtera. Kita selaku kaum muslimin harus mampu menciptakan seperti itu, dengan semboyan "*wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'ali itsmi wal udwan*" adalah saling

membantu sama dalam membantu dan ketakwaan serta menggunakan yang sama untuk dosa dan kezaliman.

Berdasarkan dari setiap tempat pemerintahan atau negara, yakni tidak mengharuskan pemimpin itu muslim atau non muslim, karena dilihat dari setiap negara berbeda dalam pemerintahannya, kalau melihat di masa Rasulullah pemimpin harus muslim bahkan haram pemimpin non muslim. Namun kalau di Indonesia pemimpin harus muslim itu tidak bisa, karena Indonesia bukan negara Islam tapi negara demokrasi. Oleh karenanya identitas sebagai alat politik dalam ajaran agama Islam dibolehkan, namun dengan syarat-syarat di antaranya adalah: Tidak merugikan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak menggunakan dengan cara kekerasan (rasialisme), membedakan golongan satu dengan yang lainnya, suku maupun ras (fanatisme etnis).

REFERENSI

- Affandi, N. (2012). Harmoni dalam Keragaman; Sebuah Analisis Tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama. *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 14(1).
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2015). *Tafsir Ringkas*. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran.
- Chakim, S. (2022). The Youth and the Internet: The Construction of Doctrine, Islam in Practice, and Political Identity in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 13(1).
- Gutmann, A. (2003). *Identity in Democracy*. Princeton University Press.
- Haynes, J. (2020). Introductory Thoughts About Peace, Politics And Religion. *Religion*, 11(5).
- Kasir, I. (2006). *Shahih Tafsir Ibnu Kasir (Tafsir al-Qur'an al-'Azim)*. Pustaka Ibnu Kasir.
- Kauffman, L. A. (2001). The Anti-Politics of Identity. In *Identity Politics in the Women's Movement*. New York University Press.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>
- Muhtar, A. (2012). Menguatnya Politik Identitas. *Jurnal Pemerintahan*, 3(1).
- Rahman, A. (2012). *Modus Sukses Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah*. Institut PTIQ.
- Rasyid, S. (1976). *Fiqh Islam*. At Tahiriyah.
- Setyaningrum, A. (2005). *Politik Perlawanan: Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial*. Jurnal Mandatory.
- Shaltut, M. (1966). *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Dar al-Qalam.
- Syarif, U. A. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanpa Tanda Identitas*. Indonesiatara.
- Widayanti, T. (2009). *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM Press.